

Bab III

Dinamika Hubungan Iran dengan Mesir dan Suriah Pra-Revolusi

A. Mesir

Republik Arab Mesir, (Arab: مصر) adalah sebuah negara yang sebagian besar wilayahnya terletak di Afrika bagian timur laut. Mesir juga digolongkan negara maju di Afrika. Mesir juga merupakan Negara pertama di dunia yang mengakui kedaulatan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

Dengan luas wilayah sekitar 997.739 km² Mesir mencakup Semenanjung Sinai (dianggap sebagai bagian dari Asia Barat Daya), sedangkan sebagian besar wilayahnya terletak di Afrika Utara. Mesir berbatasan dengan Libya di sebelah barat, Sudan di selatan, jalur Gaza dan Israel di utara-timur. Perbatasannya dengan perairan ialah melalui Laut Tengah di utara dan Laut Merah di timur.

Mayoritas penduduk Mesir menetap di pinggir Sungai Nil (sekitar 40.000 km²). Sebagian besar daratan merupakan bagian dari gurun Sahara yang jarang dihuni. Mayoritas penduduk negara Mesir adalah Islam. Mesir terkenal dengan peradaban kuno dan beberapa monumen kuno termegah di dunia, misalnya Piramid Giza, Kuil Karnak dan Lembah Raja serta Kuil Ramses. Di Luxor, sebuah kota di wilayah selatan, terdapat kira-kira artefak kuno yang mencakup sekitar 65% artefak kuno di seluruh dunia. Kini, Mesir diakui secara luas sebagai pusat budaya dan politikal utama di wilayah Arab dan Timur Tengah.¹

¹ <http://id.wikipedia.org/wiki/Mesir> diakses pada 23/10/2012 pada pukul 21:56

Mesir berbentuk republik sejak 18 Juni 1953. Mohammed Hosni Mubarak telah menjabat sebagai Presiden Mesir selama lima periode, sejak 14 Oktober 1981 setelah pembunuhan Presiden Mohammed Anwar el-Sadat. Selain itu, ia juga pemimpin Partai Demokrat Nasional. Perdana Menteri Mesir, Dr. Ahmed Nazif dilantik pada 9 Juli 2004 untuk menggantikan Dr. Atef Ebeid.

Kekuasaan di Mesir diatur dengan sistem semi-presidensial multipartai. Secara teoritis, kekuasaan eksekutif dibagi antara presiden dan perdana menteri namun dalam prakteknya kekuasaan terpusat pada presiden, yang selama ini dipilih dalam pemilu dengan kandidat tunggal. Mesir juga mengadakan pemilu parlemen multi-partai.

Pada akhir Februari 2005, Presiden Mubarak mengumumkan perubahan aturan pemilihan presiden menuju ke pemilu multi-kandidat. Untuk pertama kalinya sejak 1952, rakyat Mesir mendapat kesempatan untuk memilih pemimpin dari daftar berbagai kandidat. Namun, aturan yang baru juga menerapkan berbagai batasan sehingga berbagai tokoh, seperti Ayman Nour, tidak bisa bersaing dalam pemilihan dan Mubarak pun kembali menang dalam pemilu.

Pada akhir Januari 2011 rakyat Mesir menuntut Presiden yang sedang berkuasa, Hosni Mubarak untuk meletakkan jabatannya. Hingga 18 hari aksi demonstrasi besar-besaran menuntut Presiden Hosni Mubarak mundur, akhirnya pada tanggal 11 Februari 2011 Hosni Mubarak resmi mengundurkan diri. Pengunduran diri Hosni Mubarak ini disambut baik oleh rakyatnya, dan disambut baik oleh dunia Internasional.

Hubungan Iran dan Mesir

Hubungan bilateral antara Iran dan Mesir terputus sejak tahun 1979. Hal itu disebabkan oleh disepakatinya perjanjian Camp David oleh Mesir yang pada saat itu dipimpin oleh Anwar el-Sadat yang berisi perdamaian antara Mesir dan Israel. Ayatullah Khomeini sangat mengecam hal tersebut dan memfatwakan bahwa kesepakatan tersebut merupakan bentuk penistaan terhadap Islam. Khomeini juga menghimbau agar rakyat Mesir menggulingkan pemerintahan Anwar el-Sadat. Keruhnya hubungan Iran dan Mesir diperparah lagi dengan keputusan Mesir mengizinkan keluarga Shah yang digulingkan oleh rakyat Iran untuk menetap dan dilindungi oleh pemerintah Mesir. Hubungan Iran dan Mesir resmi putus pada bulan Juni 1979.

Hal lain yang menambah keruhnya hubungan Iran dan Mesir adalah ketika terjadi perang antara Iran dan Irak tahun 1980-1989, Mesir dengan lantang mendukung Irak yang walaupun pada saat itu di bawah kepemimpinan Saddam Husein yang juga menentang perdamaian antara Mesir dan Israel. Mesir memberi bantuan persenjataan kepada Irak sekitar \$ 5 miliar pada tahun 1980-1987, termasuk didalamnya tank, amunisi dan rudal Scud B versi Soviet.²

Pada era Hosni Mubarak, hubungan Iran dan Mesir tidak kunjung membaik. Hosni Mubarak menganggap Iran telah mendukung kelompok teroris Hamas dan Hizbullah yang merupakan ancaman bagi keamanan nasional Mesir. Hamas

² <http://www.irantracker.org/foreign-relations/egypt-iran-foreign-relations> diakses pada 12/10/12

adalah salah satu kelompok yang sangat anti Israel. Hamas berpusat di Gaza, Palestina yang berbatasan langsung dengan Mesir. Hamas memiliki hubungan erat dengan kelompok Ikhwanul Muslimin yang juga merupakan organisasi terlarang di Mesir. Pemerintah Mesir telah melihat dukungan Iran untuk Hamas sebagai bentuk campur tangan dalam urusan dalam negeri Mesir dan tantangan terhadap keamanan nasional.

Begitu juga halnya dengan Hizbullah. Kekhawatiran Mesir terhadap dukungan Iran untuk Hizbullah bertambah ketika Mesir menangkap 25 anggota organisasi teroris pada tahun 2009 yang merencanakan untuk menyerang kapal yang bepergian melalui Terusan Suez kemudian meledakkan bahan peledak di lokasi wisata Mesir dan menyelundupkan senjata ke kelompok militan di Jalur Gaza. Pemerintah Mesir juga menuduh Iran telah membantu kelompok teroris al-Jihad yang telah membunuh Anwar Saadat. Ditambah lagi ketika Iran mendedikasikan nama pembunuh Anwar el-Sadat, "Khaled al Islambouli" sebagai nama sebuah jalan di Teheran.

Mesir juga melihat program nuklir Iran sebagai ancaman potensial. Presiden Hosni Mubarak dan pejabat Mesir telah mendukung hak Iran untuk program nuklir damai, tetapi sangat menentang Iran memperoleh senjata nuklir. Utusan PBB Mesir mengatakan pada tahun 2010 bahwa Mesir tidak akan berdiri diam sebagai "warga kelas dua" di Timur Tengah jika negara-negara lain memiliki senjata nuklir.

Setelah keberhasilan rakyat Mesir menggulingkan Hosni Mubarak pada Tahun 2011 dan kemudian Muhammad Mursi terpilih menjadi presiden Mesir, Iran dan Mesir tampaknya mulai melakukan pendekatan untuk memperbaiki hubungan antar keduanya. Hal ini terlihat ketika Mursi mau menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non-Blok (KTT GNB) bulan Juni 2012 yang diadakan di Iran setelah selama tiga dekade pemerintah Mesir tidak pernah mengunjungi Teheran. Para pengamat politik menganggap ini sebagai awal yang baik bagi Iran dan Mesir untuk memperbaiki hubungan diplomatik.

Pada tanggal 10 Oktober 2012 lalu sebuah delegasi bisnis Mesir berkunjung ke Iran dan menggelar pertemuan dengan para pejabat tinggi dan pebisnis di Kementerian Industri, Pertambangan dan Perdagangan Republik Islam Iran. Hal itu dikemukakan oleh Sayid Reza Nourani, pemimpin Persatuan Pengekspor dan Pengimpor Produk Pertanian Iran. Dalam pertemuan itu, kedua pihak membicarakan berbagai peluang bisnis dan perdagangan serta setuju memulai kerjasama perdagangan buah-buahan dan jeruk.³

³ http://indonesian.irib.ir/ekonomi/-/asset_publisher/ShX2/content/hubungan-iran-mesir-tidak-lagi-beku-1 diakses pada 25/10/2012 pada pukul 13:59

B. Suriah

Republik Arab Suriah (Arab: الجمهورية العربية السورية), adalah negara yang terletak di Timur Tengah, dengan negara Turki di sebelah utara, Irak di Timur, Laut Tengah di barat dan Yordania di selatan. Suriah beribukota Damaskus.⁴

Suriah juga merupakan negara yang telah memiliki peradaban semenjak tahun 2500 SM. Menurut catatan sejarah, dahulu Suriah termasuk dalam wilayah Syam yang meliputi wilayah Palestina, Libanon, dan Yordania. Bangsa- bangsa pra-sejarah yang pernah menetap disana adalah bangsa 'Umuriyyun, Kan'aniyyun dan Aramiyyun.

Suriah selama tujuh abad pertama dikuasai oleh Bizantium (Romawi Timur) dan pernah pula dikuasai oleh Persia pada masa kejayaan dinasti Sassania, namun hanya beberapa tahun saja karena Bizantium kembali dapat merebut Suriah dari Persia dibawah kepemimpinan Heraklius.

Islam mulai masuk ke Suriah pada masa pemerintahan Umar bin Khattab melalui penaklukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid pada tahun 635 M. Pada tahun tersebut wilayah pertama yang berhasil dikuasai adalah Damaskus. Suriah terus berada dibawah kekuasaan islam dengan dinasti yang terus berganti dari Khulafa al-Rasyidin kemudian bani Umayyah dan yang terakhir dinasti Turki Utsmani.

⁴ <http://id.wikipedia.org/wiki/Suriah> diakses pada 24/10/2012 pada pukul 19:45

Akhir abad ke-18, banyak daerah-daerah di Suriah dikuasai oleh para *Pasha* (panglima perang) setempat. Kemunduran Imperium Turki Utsmani memberikan peluang bagi masuknya kekuasaan Eropa di Suriah. Kekalahan Turki dalam perang dunia I, menyebabkan Turki harus menyerahkan sebagian wilayah kekuasaannya berada dibawah pengawasan Liga Bangsa-Bangsa.⁵ Prancis mendapat wewenang dari Liga Bangsa-Bangsa untuk menguasai wilayah Levant yang pada saat itu masih meliputi wilayah Suriah dan Lebanon.

Negara Suriah terlepas dari penjajahan Prancis pada bulan April 1946 , sedangkan terbentuk menjadi negara Republik pada tahun 1941 . Semua itu ada di bawah undang-undang militer sejak Maret 1949 . Yaitu merupakan undang-undang multi partai, akan tetapi pada realitasnya hanya sebagai formalitas belaka. Pada tahun itu yang menguasai hanya satu partai yaitu Partai al-Baa'ts yang mengatur dari segala lini kehidupan, walaupun di sana banyak partai, akan tetapi tidak berfungsi.

Setelah mendapatkan kemerdekaan dari penjajahan Perancis, pada tahun 1949, selama masa kemerdekaanya Suriah sudah mengalami tiga kali kudeta kekuasaan yang berturut-turut dalam jangka waktu satu tahun, kudeta ini di lakukan oleh pihak militer. Kudeta yang pertama; pada bulan Maret 1949, di bawah kepemimpinan Sami al-Hanawi yang memimpin kekuasaan Suriah. Kudeta yang kedua di bawah kepemimpinan Hasan al-Zaim yang di bantu oleh negara Inggris yang terjadi pada bulan Agustus, ini juga tidak lama berkuasa.

⁵ <http://hbmulyana.wordpress.com/2008/02/19/sejarah-mengenai-suriah-dan-lebanon/>
diakses pada 24/10/2012 pada pukul 20:14

Kemudian terus terjadi kudeta yang ketiga terjadi pada bulan September masih pada tahun yang sama, di bawah pimpinan Adib Al-Syisyakli, sehingga sampai tahun 1971 merupakan silsilah kudeta yang di lakukan Militer.

Akan tetapi pada bulan Februari tahun 1954 M, terjadilah kudeta yang keempat yang di pimpin oleh Hasyim al-Aqhasi, pada saat itu kekuasaan berada di tangan Adib Al-Syisyakli. Pada bulan Januari tahun 1957 terjadi kudeta yang kelima, berada di bawah kepemimpinan Syukri al-Quutli, yang pada saat itu sudah terjadi persatuan antara Mesir dan Suriah. Pada tanggal 28 September 1961 , terjadi lagi kudeta yang keenam yang di lakukan oleh Tadzim al-Qudsi, yang memberhentikan orde Al-Quutli dan berakhirnya persatuan Mesir-Syiria. Pada tanggal 2 Maret 1966 , di bawah pimpinan Shalah Gadid, mengadakan kudeta yang ketujuh. Kudeta ini berhasil merebut kekuasaannya Tadzim al-Qudsi.

Pada masa perebutan kekuasaan yang ketujuh berhasil menjadikan Nurdin al-Anaasi menjadi Presiden Syiria dan Shalah Gadid menjadi Perdana Mentri. Dalam masa pemerintahan Al-Anaasi mengalami banyak krisis pada masa pemerintahanya. Ada juga pada masa pemerintahanya golongan militer yang moderat yang dipimpin oleh Hafidz al-Asad, sedangkan dia pada masa itu menjabat sebagai Menteri pertahanan dan keamanan Syiria.

Dengan kegigihannya, Hafidz al-Asad mulai ikut intervensi ketika Suriah akan menyerang Jordania. Sekaligus pada masa itu memimpin pemerintahan pada bulan November 1970 . Dan membentuk Majelis *Sya'ab* yang menentukan Hafidz al-Asad sebagai Presiden Syiria pada 22 November 1971 . Sampai terjadinya

Referendum pada tanggal 18 Maret pada tahun yang sama. Kemudian Referendum itu di perbaharui pada tahun 1978 sampai tahun 1985 . Pada tahun itu juga terjadi pengangkatan tiga wakil sekaligus. Sedangkan yang diangkat adalah saudaranya sendiri yaitu; Rif'at al-Asad, Abdul Halim Khadam, dan Muhammad Zuhair Musyrikah.⁶

Hubungan Iran dan Suriah

Hubungan antara Iran dan Suriah telah berlangsung sejak tahun 1979. Kedua negara ini telah membentuk aliansi yang sangat kuat hingga menjadi kekuatan yang diperhitungkan di kawasan Timur Tengah. Faktor perekat hubungan antara kedua negara ini adalah beberapa kesamaan kepentingan yang dimiliki keduanya. Iran dan Suriah mempunyai tujuan yang sama yaitu ingin menjadi penghalang bagi Amerika dan Israel yang ingin menguasai Timur Tengah.

Apabila meninjau sejarah maka kerjasama antara Suriah dan Iran dapat dibagi menjadi enam fase sebagaimana yang ditulis oleh Jubin Goodarsi⁷. Fase *pertama* adalah "Aliansi baru 1979-1982". Suriah adalah negara Arab pertama yang mengakui pemerintahan sementara Perdana Menteri Mehdi Bazargan setelah penggulingan Syah dan ketiga secara keseluruhan, setelah Uni Soviet dan Pakistan. Damaskus memberikan dukungan diplomatik dan militer yang tidak

⁶<http://alhamdulillah-abhot.blogspot.com/2012/06/sejarah-republik-suriah.html> diakses pada 24/10/2012 pukul 20:16 WIB

⁷<http://iranprimer.usip.org/resource/iran-and-syria> diakses pada 14/10/12 pukul 9:58 WIB

ternilai bagi Teheran ketika invasi Irak tahun 1980 ke Iran. Aliansi antara kedua negara diresmikan pada bulan Maret 1982, ketika delegasi tingkat tinggi Suriah, yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri saat itu, Abd al-Halim Khaddam yang mengunjungi Teheran dan membicarakan serangkaian perjanjian bilateral mengenai perdagangan minyak dan perjanjian rahasia mengenai hal-hal militer.

Fase *kedua* adalah “puncak kerjasama Suriah-Iran 1982-1985”. Titik tertinggi kerjasama Iran dan Suriah adalah kerjasama bilateral di Levant. Setelah tahun 1982 Israel melakukan invasi ke Lebanon dan mengusir pasukan Suriah di sana, Presiden Suriah Hafez Assad menggunakan pengaruh Iran di antara Syiah Lebanon untuk melancarkan kampanye *subversif*, teror dan perang gerilya terhadap lawan bersama mereka di Lebanon yang didominasi Kristen, pasukan Israel, pasukan Amerika Serikat dan pasukan penjaga perdamaian Perancis. Bersama-sama mereka mengatur serangkaian serangan yang menghancurkan kekuasaan pemerintah Lebanon. Akibat dari serangan itu diantaranya: Presiden Lebanon, Bashir Gemayel dibunuh pada bulan September 1982, markas militer Israel di Tirus dibom pada bulan November 1982, bom bunuh diri di era modern pertama kali terjadi di Kedutaan Besar AS di barat Beirut pada bulan April 1983, barak marinir AS, Pasukan Multi-nasional dan kontingen Perancis dibom dalam beberapa menit saja pada bulan Oktober 1983, Markas Israel di Lebanon selatan yang dibom lagi pada bulan November 1983 dan lagi-lagi Kedutaan AS dibom di timur Beirut pada bulan September 1984. karena Tidak dapat memenuhi misinya, pasukan AS menarik diri pada awal 1984. Tahun 1983 perjanjian perdamaian

Israel-Lebanon dibatalkan. Dan Israel memulai penarikan sebagian pasukannya dari sebagian besar wilayah yang awalnya dikuasai pada tahun 1985.

Fase *ketiga* adalah fase “Ketegangan Aliansi dan konsolidasi 1985-1988”. Pada akhir 1980-an menjadi fase paling bermasalah dari kemitraan Suriah-Iran. Perang sipil Lebanon, perang Iran- Irak menguras sumber daya kedua negara dan menggerogoti kekuatan hubungan antara Damaskus-Teheran. Iran dan Suriah juga mengembangkan agenda bertentangan di Lebanon, khususnya dalam memilih sekutu Syiah mereka. Suriah mendukung Amal, partai politik dan milisi yang merupakan wakil dari Syiah Lebanon. Sebaliknya Iran mendukung Hizbullah, gerakan ekstremis bawah tanah. Iran lebih memusatkan sebagian besar kekuatannya yang untuk mayoritas Muslim Lebanon, terutama Syiah karena masyarakat Lebanon banyak yang menganut Syi’ah.

Retaknya hubungan ini dapat diperbaiki kembali ketika kedua belah pihak sama-sama menyatukan kesefahaman; Iran akan mendukung Suriah sepenuhnya dalam kasus Levant sedangkan Suriah akan mendukung Iran dalam kasus Teluk.

Fase *keempat* adalah “Pengepungan Saddam Hussein 1988-1991”. Kerjasama difokuskan pada pengintaian kekuatan Irak dan menghancurkan anti-Suriah. Selama tahun 1990-1991 Perang Teluk melawan Irak, Suriah mengirim pasukan untuk koalisi dengan pimpinan AS sedangkan Iran lebih memilih bersikap netral. Damaskus berharap untuk menuai keuntungan dari upaya perdamaian di Timur Tengah, sementara Iran tidak mengambil sikap terhadap

kehadiran militer AS. Iran hanya berharap dengan adanya militer AS pada akhirnya akan melemahkan kekuatan Baghdad di wilayah Teluk.

Fase *kelima* adalah "Aliansi kerjasama periode pasca Perang Dingin 1991-2003". Setelah Perang Dingin berakhir dan Amerika Serikat menjadi kekuatan dominan di dunia, Teheran dan Damaskus semakin membutuhkan satu sama lain. Mereka bekerja sama dalam pengembangan rudal balistik, berkolaborasi dalam mempersenjatai Hizbullah dan Hamas untuk bersekongkol dalam menekan Israel, serta untuk ikut berperan dalam peristiwa-peristiwa di Lebanon dan Otoritas Palestina. Bantuan mereka sangat berperan penting dalam memungkinkan Hizbullah untuk melancarkan kampanye gerilya di dua negara diatas dalam rangka melawan Israel yang kemudian akhirnya Israel memilih untuk mundur pada tahun 2000

Fase *keenam* adalah "penguatan kembali aliansi setelah perang Irak tahun 2003". Kerjasama antara Iran dan Suriah meningkat tajam setelah invasi AS ke Irak pada tahun 2003. Kedua negara menyambut gembira penggulingan Saddam Hussein, musuh bersama mereka. Namun kemenangan militer AS awalnya juga menimbulkan kekhawatiran baik Iran atau Suriah karena mungkin saja keduanya akan menjadi sasaran berikutnya dalam pemerintahan Bush "Perang Melawan Teror." Keduanya memberikan bantuan yang signifikan untuk pasukan domestik dan asing di Irak.

Ketika Obama memerintah Amerika Serikat dan mengumumkan rencana untuk menarik pasukan dari Irak, Suriah dan Iran terus mengembangkan pengaruh mereka di Irak khususnya bekerjasama dengan partai politik dan milisi Syi'ah. Iran dan Suriah tidak ingin terjadi perang saudara lagi di Irak dan juga tidak mau AS dan sekutunya terus berkuasa di Irak.

Ada pakar politik yang menilai kerjasama dan hubungan antara Iran dan Suriah adalah hubungan abadi yang akan terus berlanjut sampai kapanpun. Ini disebabkan oleh banyaknya kesamaan kepentingan, kesamaan musuh dan rasa saling membutuhkan antara kedua negara. Ini sangat terlihat ketika terjadi kobaran revolusi di Suriah, Iran menjadi tameng terdepan yang membela pemerintahan Bashar al-Asad, anak dari Hafiz al-Asad.